

ABSTRAK

Pekerja rumahan yang bekerja secara putting out system di Indonesia sampai saat ini masih belum mendapatkan perlindungan hukum dan pengawasan ketenagakerjaan dari pemerintah. Banyak Permasalahan yang dihadapi oleh pekerja rumahan yang bekerja secara putting out system mulai tidak adanya kontrak kerja tertulis, upah yang rendah, jam kerja yang panjang dan pelanggaran hak pekerja yang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk Pertama mengetahui landasan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak pekerja rumahan yang bekerja secara putting out system, Kedua mengetahui pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam melindungi dan pemenuhan hak pekerja rumahan yang bekerja secara putting out system, Ketiga mengetahui strategi dalam kegiatan pengawasan ketenagakerjaan oleh pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam melindungi dan pemenuhan hak pekerja rumahan yang bekerja secara putting out system.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dalam bentuk wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan Pertama landasan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang sampai Peraturan Gubernur Jawa Tengah, Kedua Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tidak melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan terhadap pekerja rumahan yang bekerja secara putting out system, Ketiga Tidak ada strategi dari pemerintah baik pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan kepada pekerja rumahan yang bekerja secara putting out system. Saran bagi pemerintah yaitu Pertama segera disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pekerja rumahan yang bekerja secara putting out system, Kedua, perlu menambahkan personil pengawas ketenagakerjaan karena jumlah perusahaan yang diawasi tidak sebanding dengan jumlah pengawas yang ada, Ketiga, pengawasan ketenagakerjaan terhadap pekerja rumahan yang bekerja secara putting out system harus tetap dilaksanakan karena mereka harus tetap dianggap sebagai pekerja pada umumnya

Kata Kunci: Pengawasan Ketenagakerjaan, Pekerja Rumahan, Putting Out System.

ABSTRACT

Home workers who work under the putting out system in Indonesia still do not receive legal protection and labor supervision from the government. There are many problems faced by home workers who work under the putting out system, starting from the absence of a written work contract, low wages, long working hours and other violations of workers' rights. This study aims to First, to know the basis for the implementation of labor inspection in the context of protecting and fulfilling the rights of home workers who work in the putting out system, Second, to know the implementation of supervisory activities by supervisors of the Manpower and Transmigration Office of Central Java Province in protecting and fulfilling the rights of home workers who work in the putting out system, Third, to know the strategy in labor inspection activities by supervisors of the Manpower and Transmigration Office of Central Java Province in protecting and fulfilling the rights of home workers who work in the putting out system.

The research method used in this research is qualitative research with an empirical juridical approach. The research specification used is descriptive analytical. The data collection method is done by examining primary data and secondary data obtained through field studies in the form of interviews and literature studies.

The results of the study show First, the basis for the implementation of labor inspection has been regulated in laws and regulations ranging from laws to Central Java Governor Regulations, Second, the Central Java Provincial Manpower and Transmigration Office does not carry out labor inspection of home workers who work in the putting out system, Third, there is no strategy from the government either the central government or the Central Java Provincial Government related to labor protection and supervision to home workers who work in the putting out system. Suggestions for the government are First, legislation should be drafted immediately governing the rights of home workers who work in the putting out system, Second, it is necessary to add labor inspector personnel because the number of companies being supervised is not comparable to the number of existing supervisors, Third, labor supervision of home workers who work in the putting out system must continue to be implemented because they must still be considered as workers in general.

Keywords: Labor Inspection, Home Workers, Putting Out System.